KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberi kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk mereviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi

IKU Pengadilan Negeri Parigi ini merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandate *(core business)* yang diemban. Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan utama dan targetnya. IKU sangat penting ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja Pengadilan Negeri Parigi, maka diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih.

IKU ini dibuat dan disusun untuk memenuhi Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan dan penyusunan IKU ini tidak mudah karena itu IKU ini masih jauh dari sempurna, banyak faktor yang menjadi tantangan dalam implementasinya, antara lain faktor keterbatasan Anggaran dan SDM yang dimiliki, untuk itu kami berharap kiranya ada masukan yang positif untuk menjadikan IKU Pengadilan Negeri Parigi kedepan dapat disusun dengan baik dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dalam pembuatan dan penyusunan IKU ini, dan semoga IKU yang telah disusun dapat dijadikan acuan memaksimalkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi dan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Parigi, 25 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas

YAKOBUS MANU, S.H.
NIP.197802032003121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. Latar belakang..... 1
2. Maksud dan tujuan 1

BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

BAB III. PENUTUP..... 9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN dan RB RI) Nomor : PER/09.M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah. Berkaitan dengan Permen PAN dan RB RI tersebut maka Pengadilan Negeri Parigi menyusun IKU ini yang merupakan gambaran tingkat keberhasilan pencapaiaan sasaran atau tujuan yang merupakan penjabaran dari visi, misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Parigi.

Dalam proses perencanaan setiap tahun anggaran , setiap pimpinan unit kerja harus menetapkan IKU. IKU dimaksud harus selaras dengan IKU yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor. 192/KMA/SK/IX/2016 tentang Penetapan Reviu IKU Mahkamah Agung. antar tingkat unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan atau indikator hasil (outcome).

IKU dimaksud harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai, yitu dapat diukur atau dikualifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang di ukur
5. Dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah diitetapkan

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan IKU Pengadilan Negeri Parigi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas baik dibidang yudisial maupun bidang non yudisial dan dalam menyelenggaran manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Parigi, maka ditetapkan sistem pengkuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA).

IKU tersebut harus merupakan sesuatu yang akan diiukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kerja suatu program yang diperlukan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan indikator kuantitatif yaitu dengan menggunakan jumlah dan persentase.

Adapun IKU Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana tersebut dalam matriks berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PARIGI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ✓ Perdata ✓ Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}}$ X 100% Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : ✓ Perdata ✓ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}}$ X 100% Catatan : • Perbanding jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : ✓ Perdata ✓ Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ x 100% Tn = Sisa Perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: – Banding – Kasasi – Peninjauan Kembali	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum / Jumlah putusan Perkara X 100% Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi / Jumlah Perkara Pidana Anak x 100% Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : Sesuai PERPMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu / Jumlah Putusan X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi / Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi X 100% Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK Secara Lengkap / Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara Pidana Khusus yang di upload dalam website / Jumlah Perkara Pidana Khusus yang di putus x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan / Jumlah Perkara Prodeo X 100% Catatan: · Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan · Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}}$ X 100% Catatan: · Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan · Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ X 100% Catatan: · Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan · Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang titindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ X 100% Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Perkara yg ditindaklanjuti : Pekara yng sudah incraht yang tidak mengajukan eksekusi dan permohonan eksekusi yang berhasil	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI PARIGI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	- Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Negeri Parigi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	- Perbandingan antara Jumlah hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Negeri Parigi	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial	- Perbadingan antara jumlah SDM teknis dan non teknis yang lulus/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	- Perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III
PENUTUP

Pengadilan Negeri Parigi sebagai lembaga pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang hukum, berkewajiban menyusun IKU sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Parigi. Penyusunan IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Parigi , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

IKU diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan benar. Oleh karena itu Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi telah melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor W21-U7/199/KP.04.6/12/2021 Tanggal Desember 2021 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Parigi.